

**DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN
PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

AHMAD HERRYANDI NOVRIAN

NPM 2221031044



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN
PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

Oleh:

AHMAD HERRYANDI NOVRIAN

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MASTER AKUNTANSI**

Pada

**Prodi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Oleh

AHMAD HERRYANDI NOVRIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan utama pencegahan kecurangan dalam kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap para pelaku program, seperti fasilitator, aparat desa, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis dan pengolahan data dilakukan menggunakan model *Structural Equation Model (SEM)* dengan bantuan aplikasi *Smart PLS* untuk menguji hubungan antara variabel independen dan tindakan pencegahan kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing*, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Ketiga faktor ini berperan penting dalam membangun tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Transparansi dalam pengelolaan dana, pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan integritas pemimpin lokal adalah determinan utama dalam pencegahan kecurangan. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan program juga terbukti meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan potensi kecurangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengawasan partisipatif, peningkatan literasi digital, serta penegakan sanksi yang tegas untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Kecurangan, Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

DETERMINANTS OF FRAUD PREVENTION IN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IMPLEMENTATION ACTIVITIES IN INDONESIA

By

AHMAD HERRYANDI NOVRIAN

This study aims to identify the key determinants of fraud prevention in the implementation of community empowerment programs. The research employs a quantitative approach using surveys conducted among program stakeholders, such as facilitators, village officials, and beneficiary communities. Data analysis is performed using Structural Equation Model (SEM) PLS methods to examine the relationship between independent variables and fraud prevention measures. The results of the study indicate that whistleblowing, organizational commitment, and internal control systems have a positive and significant influence on fraud prevention. These three factors play an important role in building transparent, accountable, and integrity-based organizational governance. Transparency in fund management, community participation-based supervision, human resource capacity, and integrity of local leaders are the main determinants in fraud prevention. In addition, the application of digital technology in program management has also been shown to increase accountability and minimize the potential for fraud. This study recommends strengthening participatory supervision capacity, increasing digital literacy, and enforcing strict sanctions to create better governance in community empowerment programs.

Keywords: *Fraud, Prevention, Community Empowerment, Transparency, Accountability*

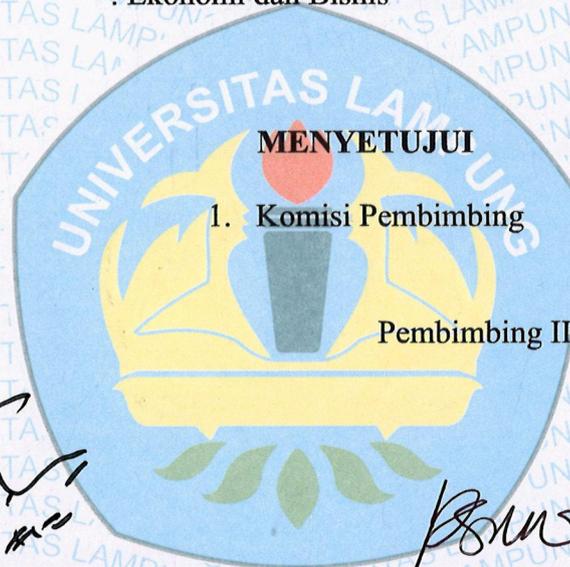
Judul Tesis : **DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN
PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Herryandi Novrian**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031044

Jurusan : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 19761023 200212 1 002

Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19820623 200812 1 001

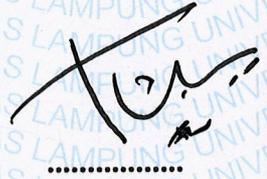
2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP. 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.



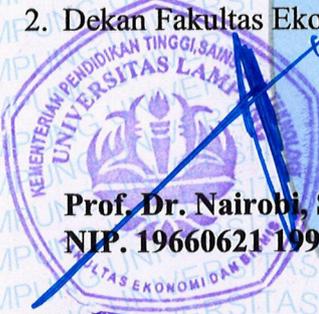
Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.



Anggota Penguji : Chara Pratami TT, S.E., M.Acc., Akt., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**



3. Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001**

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 07 Mei 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Herryandi Novrian

NPM : 2221031044

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Determinan Pencegahan Kecurangan pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia ” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing.

Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Mei 2025

Ahmad Herryandi Novrian

NPM. 2221031044

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Herryandi Novrian lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 1989, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak M. Anton Syam (Alm) dan Ibu Herawati.

Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD), diselesaikan di SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) pada tahun 2001, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2007.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (UNILA) pada tahun 2013, lalu Penulis pernah bekerja sebagai Auditor di *PT World Innovative Telecommunication* dan sebagai Konsultan Manajemen Keuangan pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Untuk Anggun Muetia,

Teman hidup dalam riuh perjuangan.

Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu menerima,

Bahu yang tak pernah lelah menopang,

Dan doa yang tak putus menguatkan langkah ini.

Untuk Zein Zyan dan Yasmin Yumna,

Dua cahaya kecil yang menjelma menjadi alasan terbesar

Mengapa Ayah terus melangkah, belajar, dan bertumbuh.

Pencapaian dan karya ini adalah bukti cinta dan harapan,

Bahwa Belajar, Berjuang dan Bermimpi

Adalah warisan yang ingin Ayah titipkan untuk kalian.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Determinan Pencegahan Kecurangan pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan dan bimbingan, serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan dan saran yang membangun selama penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, bimbingan sekaligus nasehat dan saran yang berharga dalam proses penyajian tulisan ini.
6. Bapak Pigo Nauli. S.E., M.Sc., Ph.D., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Chara Pratami TT, S.E., M.Acc., Akt., Ph.D., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan dan saran yang membangun selama penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
10. Kepada kedua Orang tua tercinta, Mamah, Herawati, S.Pd. dan Bapak, Achmad Yudhi, S.E. yang telah menjadi sumber kekuatan, keteladanan, dan semangat dalam setiap langkah penulis. Doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kasih sayang yang tulus dari Mamah dan Bapak adalah pondasi utama yang mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu percaya dan mendoakan dalam diam maupun terang, dalam suka maupun duka.
11. Kedua Adikku tersayang, Muhammad Aditya Wirayudha dan Zahra Aliyah yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebahagiaan ditengah proses penulisan tesis ini. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi pengingat

bahwa keluarga adalah sumber kekuatan yang tak tergantikan. Terima kasih telah menjadi penghibur disaat lelah dan penyemangat dalam setiap langkah

12. Seluruh team dan crew, AiR Wedding Organizer, ZYPRO Event Organizer, Outbound Organizer, terimakasih telah kebersamai selama ini, terus melangkah, belajar dan bertumbuh bersama, mengukir Memori Baik.
13. Seluruh keluarga besar dan semua pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaa bagi semua pembaca. Terima kasih.

Bandar Lampung, 07 Mei 2025

Ahmad Herryandi Novrian
NPM. 2221031044

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. <i>Fraud Pentagon Theory</i>	11
2.2. Kecurangan	14
2.2.1. Pengertian Kecurangan	14
2.2.2. Jenis-jenis Kecurangan	14
2.3. Pencegahan Kecurangan	17
2.4. <i>Whistleblowing</i>	19
2.5. Komitmen Organisasi	21
2.6. Sistem Pengendalian Internal	22
2.6. Penelitian terdahulu	26
2.1. Pengembangan Hipotesis	28
2.1.1. Pengaruh <i>Whistleblowing</i> terhadap Pencegahan Kecurangan .	28
2.1.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan kecurangan	29
2.1.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan	31
2.2. Kerangka Pemikiran	32
BAB III	33
METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.2. Definisi Operasional Variabel	33
3.3. Populasi dan Sampel	34
3.3.1 Populasi	34

3.3.2	Sampel Penelitian	37
3.4	Metode Pengumpulan Data	38
3.4.2	Metode Analisis Data	38
3.5	Pengukuran Variabel dan Uji Hipotesis	40
3.5.1	Pengukuran Variabel	40
3.5.1.1	Analisis Data Deskriptif	40
3.5.1.2	Analisis SEM-PLS	40
3.5.1.3	Analisa <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran)	41
3.5.1.4	Analisa <i>Inner Model</i> (Model Struktural)	43
3.5.1.5	Uji Model Struktural	44
3.5.1.6	Koefisien Determinasi (R^2)	45
3.6	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	46
BAB IV		49
HASIL DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Hasil Pengumpulan Data Responden	49
4.1.2	Karakteristik Responden	49
4.1.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.1.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	50
4.1.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	51
4.2	Analisis Deskriptif	52
4.2.1	Uji Instrument Validitas dan Reliabilitas	54
4.2.1.1	Hasil Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	55
4.2.1.2	Validitas Konvergen	55
4.2.1.3	Validitas Diskriminan	58
4.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	61
4.3	Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	62
4.3.1.1	<i>R-Square</i>	63
4.3.1.2	<i>Predictive Relevance (Blindfolding)</i>	63
4.4	Pengujian Hipotesis	64
4.4.1	Pengaruh <i>Whistleblowing</i> terhadap Pencegahan Kecurangan .	65
4.4.2	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan kecurangan	66

4.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan	66
4.5	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	67
4.5.1	<i>Whistleblowing</i> terhadap Pencegahan Kecurangan	67
4.5.2	Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan kecurangan.....	69
4.5.3	Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan	71
BAB V	75
KESIMPULAN	75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan	76
5.3	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Data Kecurangan	4
Gambar 2.1 <i>Fraud Pentagon</i>	12
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Hasil <i>Outer Model</i>	53
Gambar 4.2 Hasil Model Penelitian	64
Gambar 4.3 <i>Whistleblowing</i>	67
Gambar 4.4 Komitmen Organisasi	69
Gambar 4.5 Sistem Pengendalian Internal	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	33
Tabel 3.2. Ringkasan <i>Rule Of Thumb</i> Evaluasi Model Pengukuran	42
Tabel 3.3. Ringkasan <i>Rule Of Thumb</i> Evaluasi Model Struktural	43
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Responden terhadap Variabel Dependen dan Independen	51
Tabel 4.5 Hasil <i>Outer Loading</i>	55
Tabel 4. 6 Hasil <i>Average Variance Extracted</i>	56
Tabel 4. 7 Hasil <i>Cross Loading</i>	58
Tabel 4.8 Hasil <i>Fornell-Larcker Criterion</i>	60
Tabel 4.9 <i>Heterotrait-Monotrait Ratio</i> (HTMT)	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4. 11 Hasil Uji <i>R-Square</i>	62
Tabel 4.12 Hasil <i>Blindfolding</i> (Q^2)	63
Tabel 4.13 Hasil <i>Path Coefficients</i>	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian yang menyelenggarakan banyak kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis kegiatan tersebut seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), dan Program Padat Karya Tunai (PKT).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 menjelaskan bahwa Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang biasa disingkat PNPM Mandiri merupakan salah satu program nasional yang dilakukan dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dampak dari program ini secara kualitatif telah dilakukan evaluasi yang menunjukkan bahwa melalui program PNPM Mandiri ini, masyarakat dianggap sudah mampu untuk mendapatkan pangan yang lebih baik, pendidikan yang lebih lama, dapat memiliki pekerjaan dan mendapatkan usaha, jaminan kesehatan, dan dapat berpartisipasi dalam forum politik lokal.

Tujuan dari PNPM Mandiri ini yaitu untuk mengajak masyarakat dalam merancang dan memberikan persetujuan terhadap agenda pembangunan mereka sendiri.

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan, kerangka program yang transparan dan partisipatif akan membantu meningkatkan tata pemerintahan daerah. Pada program ini, masyarakat dapat memberikan usul dalam kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan disesuaikan dengan konteks yang berlaku untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dialami.

Selanjutnya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya arahnya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Tujuan program ini secara umum adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan umum tersebut memiliki dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah (PUPR, 2017) .

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan

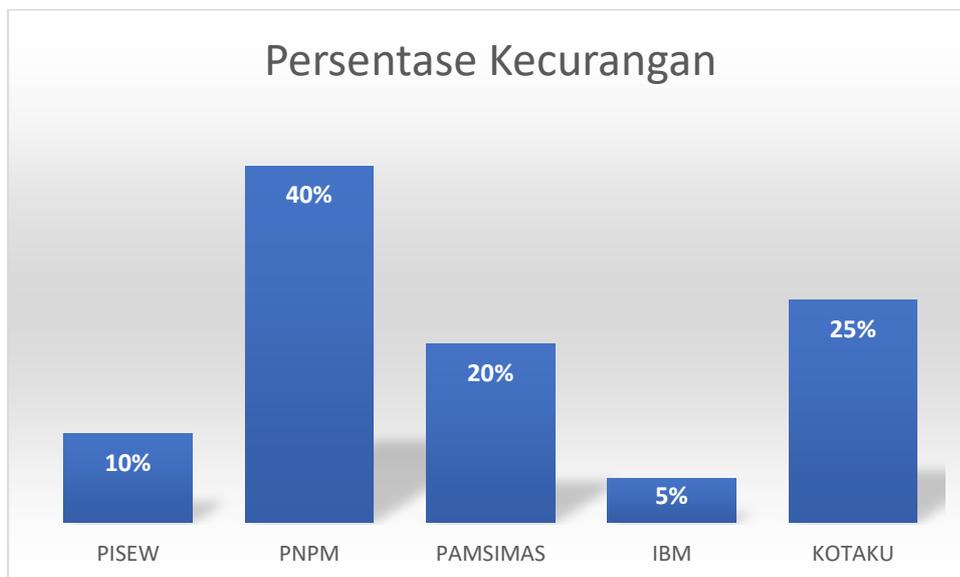
pinggiran kota (Ampl.or.id, 2016). Program PAMSIMAS merupakan contoh nyata pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan air bersih secara kolektif dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dan pendanaan (Kominfo, 2024).

Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat di pedesaan berdaya dan mampu mengelola sumber daya local yang ada untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu, PISEW mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam memperbaiki tata Kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa (Mustopa, 2020).

Program Padat Karya Tunai (PKT) merupakan program Pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, yang hasilnya akan berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi Desa/Kelurahan. PKT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting.

Seluruh Program Pemberdayaan Masyarakat ini tentu saja pada pelaksanaannya tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan seperti kritik dan kendala yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan data kecurangan yang terjadi pada setiap program yang diperoleh dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) yang dijelaskan dalam grafik berikut.

Gambar 1.1 Persentase Data Kecurangan



Sumber: Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) (2024).

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dari berbagai program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di seluruh Indonesia terjadi 10% *fraud* pada program PISEW, 40% pada program PNPM, 20% pada program PAMSIMAS, 5% pada program IBM, dan 25% pada program KOTAKU. Selain itu, permasalahan yang muncul salah satunya dapat kita lihat dari kasus yang terjadi tahun 2019 lalu terkait dana PNPM untuk dana simpan pinjam ibu-ibu di Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara yang digelapkan oleh para pengurus PNPM kecamatan dan Camat Abung Tengah mendapatkan bagian dari hasil korupsi tersebut sebesar Rp.50.000.000,-. Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana berjamaah tersebut juga melibatkan salah satu tokoh masyarakat atau tokoh agama kecamatan tersebut (Otentik, 2019).

Selain itu, pada bulan Agustus 2023 telah terjadi pula kasus korupsi dana PNPM Mandiri di Bireuen, Aceh senilai Rp.3.400.000.000.- Setelah dilakukan penyidikan

oleh jaksa penyidik, ditemukan adanya bukti dan perbuatan melawan hukum terhadap dana simpan pinjam PNPM. Sebelumnya Kejaksaan RI Bireuen melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM Mandiri pedesaan di kecamatan Jeunieb, Kab. Bireuen dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2022. Kemudian tim penyidik juga menemukan angsuran pinjaman yang tidak disetor sebesar Rp.183.800.000,- yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku (Agus, 2024).

Kasus selanjutnya yaitu korupsi proyek PAMSIMAS di Muaro Jambi. Progres pekerjaan pembangunan menara air yang belum selesai dan belum sempat dimanfaatkan oleh masyarakat. kegiatan pembangunan tersebut telah habis digunakan oleh ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) untuk kepentingan pribadinya. Kemudainadanya penyitaan berupa 75 dokumen dan kerugian negara dari proyek tersebut sebesar Rp.299.812.714 (Dimas, 2023). Kemudian kasus korupsi program Kotaku di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Makassar tahun anggaran 2018, tersangka melakukan tindakan korupsi dengan *mark-up* harga material. Dari hasil perhitungan kerugian negara ditemukan ada perbedaan harga Rp.350.000.000,- dari total anggaran material sebesar Rp.470.000.000,-. Dana yang digunakan hanya sebesar Rp.120.000.000,- (Eka, 2022).

Dengan beberapa kasus tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana dan kecurangan yang terjadi terhadap pelaksanaan program pemerintah tersebut, seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam proses penyaluran dana dan pelaksanaan program tersebut. Biasanya kecurangan dan penyelewengan anggaran tentunya tidak mudah untuk terdeteksi atau ditemukan

serta diungkap karena tindakan ilegal ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja dan tentunya dengan faktor kesengajaan untuk memperoleh manfaat dalam kepentingan pribadi para pelakunya.

Kecurangan (*fraud*) tersebut awal mula dijelaskan melalui teori *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey Pada tahun 1953 dengan menguraikan tiga kondisi yang dapat menyebabkan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kemudian muncul teori baru tentang *fraud* yaitu teori *fraud diamod* yang digagas oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Pengembangan dari teori *fraud triangle* tersebut yaitu dengan menambahkan satu faktor baru, yaitu kapabilitas (*capability*) yang merupakan kemampuan suatu jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, atau pengetahuan atas suatu sistem yang ada. Selanjutnya, saat ini teori *fraud* terus berkembang dan memunculkan teori *fraud pentagon* yang merupakan pengembangan dari teori *fraud diamod* dengan menambahkan satu faktor baru yaitu arogansi yang menggambarkan perilaku superioritas dan keserakahan dari pelaku kejahatan.

Teori *fraud* terus berkembang seiring dengan adanya penelitian yang dilakukan dalam memahami motivasi terjadinya kecurangan (*fraud*). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemicu terjadinya kecurangan tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor dalam teori *fraud triangle* saja, akan tetapi juga faktor lain seperti kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Oleh sebab itu, sangat penting diketahui penyebab apa saja yang dapat membuat terjadinya kecurangan.

Kecurangan dapat terungkap karena adanya laporan yang dilakukan oleh seseorang yang identitasnya dirahasiakan atau bisa disebut dengan *whistleblowing*. Dengan adanya *whistleblowing* dapat mencegah terjadinya kecurangan. *Whistleblowing* adalah sebuah pemberitahuan atau penyampaian informasi dari salah satu anggota organisasi dimana penyampaian ini berhubungan dengan perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang terjadi didalam suatu organisasi. Dengan adanya *whistleblowing* dapat membuat pelapor (*whistleblower*) melaporkan pelanggaran dengan lebih mudah dan penerapan *whistleblowing* juga dapat membuat seseorang berfikir lebih untuk melakukan kecurangan. Secara tidak langsung system ini juga menjadi sebuah sarana pengawas eksternal (Suandewi, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan Priandini dan Biduri (2023) menunjukkan beberapa faktor yang memberikan pengaruh bagi pencegahan *fraud* yaitu kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia), serta *whistleblowing System*, kemudian moralitas individu. Sementara itu, faktor dari sistem pengendalian internal sebagai faktor yang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suandewi (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan, dan *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penipuan.

Selain aspek pemenuhan kewajiban audit atas laporan keuangan yang harus dilakukan, penilaian yang lebih luas juga sangat dibutuhkan seperti penilaian yang mencakup aspek-aspek lain selain penilaian keuangan suatu program seperti aspek yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan program, aspek

pengendalian internal, kinerja, komitmen organisasi serta kepatuhan program juga sangat penting untuk dinilai (Ismuadi & Saputra, 2016). Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi ditunjukkan dalam bentuk sikap penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah organisasi. Adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi (Meutia, 2021). Komitmen organisasi adalah sebuah kesetiaan atau loyalitas pegawai kepada organisasi tempatnya bekerja. Dengan adanya rasa komitmen terhadap organisasi tempatnya bekerja maka seseorang akan melakukan tindakan yang lebih baik dan menghindari tindakan kecurangan yang bisa merugikan banyak pihak. Komitmen organisasi dipandang sebagai suatu organisasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. (Putri *et al.*, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meutia (2021) menunjukkan bahwa komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengawasan dan arahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam sebuah organisasi, agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan kecurangan. Pengendalian internal adalah bagian dari sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional sebuah organisasi atau organisasi tertentu. Prusahaan pada umumnya

menggunakan sistem pengendalian internal dalam mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan sistem. Tujuan utama dari pengendalian internal persediaan adalah untuk memastikan bahwa persediaan dalam keadaan aman dan disajikan dalam laporan keuangan dengan akurat dan benar (Putri *et al.*, 2023). Pengendalian internal yang tidak memadai dan kolusi antara karyawan dan pihak ketiga disebut sebagai alasan paling umum yang menimbulkan penipuan (Siregar and Tenoyo, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Joseph *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kecurangan. Hasil penelitian Taufik (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan *good governance* terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian Santiadji *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu “**Determinan Pencegahan Kecurangan pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
2. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu memiliki keterbaruan dalam pengukuran dan pengujian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengajukan keterbaruan, yaitu dengan melaksanakan penelitian pada semua Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia yang diadakan oleh Kementerian PUPR, tidak hanya di beberapa provinsi atau daerah saja, tetapi di seluruh Indonesia.
2. Penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

BAB II

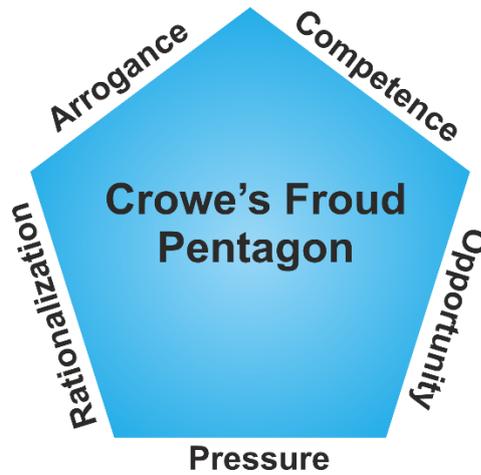
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Fraud Pentagon Theory*

Salah satu teori utama yang digunakan dalam menjelaskan tindakan kecurangan adalah teori *fraud triangle*. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada era 1950-an. Menurut Albrecht *et al.*, (2012), *fraud triangle* terdiri dari tiga elemen utama yang menjadi faktor umum penyebab seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Pada tahun 2010, Jonathan Marks mengembangkan teori *fraud triangle* menjadi teori *fraud* pentagon. Sebagai partner di Crowe Horwath LLP saat itu, Marks menambahkan dua elemen baru ke dalam konsep sebelumnya, yaitu kompetensi/kemampuan dan arogansi. Dalam artikel yang ia tulis di laman *boardandfraud.com* (2020), Marks menjelaskan bahwa pelaku kecurangan saat ini berbeda dibandingkan dengan era penelitian Cressey. Pelaku masa kini cenderung lebih mandiri dalam berpikir, memiliki akses informasi yang lebih luas, serta kontrol terhadap aset yang lebih unggul dibandingkan dengan periode ketika teori *fraud triangle* pertama kali diperkenalkan.

Gambar 2.1 *Fraud Pentagon*



Sumber : Nugroho (2021)

Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam teori *fraud* pentagon:

1. Tekanan (*Pressure*)

Menurut Albrecht *et al.*, (2012), tekanan merujuk pada situasi di mana seseorang merasa terdesak untuk mencapai suatu target, tetapi terhalang oleh keterbatasan yang dimilikinya. Akibatnya, individu tersebut dapat terdorong untuk melakukan kecurangan sebagai cara untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan adalah keadaan di mana seseorang memiliki peluang untuk melakukan kecurangan dalam kondisi yang mendukung serta minim risiko terdeteksi. Semakin besar peluang yang tersedia, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan (Albrecht *et al.*, 2012). Sementara itu, Maharani (2018) menambahkan bahwa kesempatan dapat muncul secara disengaja maupun tidak, menciptakan situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah upaya seseorang untuk membenarkan tindakan yang tidak etis dengan alasan yang keliru. (Albrecht *et al.*, 2012) Sementara itu, Irawati (2018) menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan mekanisme pembelaan diri yang digunakan individu untuk meredam rasa bersalah atas perilaku yang tidak benar.

4. Kompetensi/Kemampuan (*Competence/Capability*)

Kompetensi dalam konteks *fraud* merujuk pada kemampuan pelaku dalam melewati sistem pengendalian internal, merancang strategi penggelapan yang kompleks, serta mengendalikan dinamika sosial untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dilakukan dengan mempengaruhi orang lain agar terlibat dalam kecurangan. Namun, kemampuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tanpa adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. (Marks, 2020)

5. Arogansi (*Arrogance*)

Menurut Marks (2020), arogansi adalah sikap merasa superior atau memiliki keserakahan yang tinggi pada pelaku kecurangan. Mereka meyakini bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat menyentuh atau membatasi tindakan mereka. Sikap ini membuat pelaku lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul. Akibatnya, mereka cenderung bertindak semaunya, bahkan jika harus menggunakan cara-cara pemaksaan.

2.2. Kecurangan

2.2.1. Pengertian Kecurangan

Kecurangan adalah Tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok tersebut mendapatkan keuntungan untuk mereka sendiri dan merugikan orang atau kelompok lain. Kecurangan meliputi berbagai tindakan melawan hukum dan audit investigasi biasanya melakukan pemetaan terhadap *occupational fraud* (kecurangan dalam hubungan kerja) dalam proses investigasinya. Kecurangan merupakan hambatan yang sangat besar bagi pembangunan suatu negara karena dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan (Periansya *et al.*, 2023).

Menurut Burnes *et al.*, (2017) kecurangan dapat dibedakan kedalam beberapa perspektif meliputi keterkaitan dengan konflik kepentingan, keterkaitan dengan asset misappropriation (pengambilan asset secara ilegal) serta keterkaitan dengan penerimaan dan persediaan.

2.2.2. Jenis-jenis Kecurangan

Beberapa jenis kecurangan yang sering sekali bisa dilihat dalam praktik organisasi pemerintahan maupun bisnis .

1. Konflik kepentingan

Berdasarkan konflik kepentingan, ada beberapa jenis kecurangan, yaitu:

1. *Bribery* atau penyuapan, merupakan tindakan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan orang yang menerimanya.

2. *Kickvack* adalah salah satu bentuk penyuapan dimana penjual dengan ikhlas memberikan hasil penjualannya Kembali ke pembeli
3. *Bid rigging* adalah skema dimana karyawan membantu sebuah vendor untuk memenangkan suatu kontrak dengan perusahaan
4. *Illegal gratuities* adalah pemberian hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan.

2. Tindakan Pengambilan Aset

Tindakan pengambilan aset secara ilegal terdapat 3 bentuk skema. Dalam klasifikasi ini, pelaku kecurangan merupakan seseorang yang sudah cukup berpengalaman dan sangat pintar. Pada umumnya kecurangan jenis ini dilakukan secara kelompok dengan peralatan dan fasilitas yang sangat lengkap dan dilakukan dengan cara yang rapi yaitu:

1. *Skimming* yaitu pencurian atau penjarahan uang sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan atau dicatat dalam pembukuan
2. *Larceny*, yaitu pencurian atau penjarahan uang dimana uang tersebut secara fisik telah masuk ke perusahaan, hal ini berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal suatu perusahaan
3. *Fraudulent disbursement* yaitu pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah.

Fraud tidak hanya dapat diartikan sebagai kecurangan. Akan tetapi banyak pengertian lain yang dapat mengartikan tentang *fraud* diantaranya yaitu:

1. Mengutip pernyataan "*fraud examiners manual*" yang mendefinisikan kecurangan sebagai keuntungan yang diperoleh dari seseorang dengan cara menghadirkan sesuatu yang palsu.
2. Menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat empat pasal yang mendefinisikan kecurangan dalam dunia keuangan, yaitu:
 - a. Pasal 362 pencurian yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 - b. Pasal 368 pemerasan dan pengancaman adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang".
 - c. Pasal 37 Penggelapan adalah dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 - d. Pasal 378: Perbuatan curang adalah dengan maksud sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau maupun menghapuskan piutang (Arifin, 2020).

2.3. Pencegahan Kecurangan

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations-COSO* (1992) pencegahan kecurangan pada umumnya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) atau yang sering dikenal sebagai IRM (*Internal Risk Management*) pencegahan kecurangan adalah upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dan membatasi kerugian yang mungkin timbul jika kecurangan terjadi. Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegrasi dan dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Pope (2007) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dalam hal pengadaan barang publik, terdiri dari:

1. Memperkuat kerangka hukum.

2. Prosedur transparan.
3. Membuka dokumen tender.
4. Evaluasi penawaran.
5. Melimpahkan wewenang.
6. Pemeriksaan dan audit independen.

Pencegahan kecurangan merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memerangi kecurangan yang meliputi kebijakan, prosedur, sistem, pelatihan, penyadaran dan komunikasi yang dapat menghambat terjadinya kecurangan sehingga harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi (Santiadji *et al.*, 2021). Terdapat tiga elemen yang digunakan untuk mencegah, mengantisipasi dan mendeteksi kecurangan dalam buku yang dituliskan Arens *et al.*, (2015) dan sudah dilakukan penelitian oleh Tunggal (2012) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya kecurangan yang kemudian menjadi indikator pencegahan terjadinya kecurangan antara lain sebagai berikut:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencegah dan mencegah penipuan adalah dengan menerapkan program dan pengendalian anti-penipuan, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut oleh perusahaan.
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan penipuan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan kemudian mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi untuk mencegah penipuan serta memantau pengendalian internal.

3. Pengawasan oleh komite audit. Komite audit mengemban tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi.

2.4. Whistleblowing

Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi (mantan atau saat ini) tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang berada di bawah kendali pemberi kerja mereka, kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat memengaruhi tindakan (Near and Miceli, 1985). *Whistleblowing* merupakan proses kompleks yang melibatkan faktor personal dan organisasi (Elias, 2008). *Whistleblowing* adalah sebuah pemberitahuan atau penyampaian informasi dari salah satu anggota organisasi dimana penyampaian tersebut berhubungan dengan perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang terjadi didalam suatu organisasi. Dengan adanya *whistleblowing* dapat membuat pelapor melaporkan pelanggaran dengan lebih mudah dan penerapan *whistleblowing* juga bisa membuat para aparatur desa berfikir lebih untuk melakukan kecurangan. Secara tidak langsung sistem ini juga menjadi sebuah sarana pengawasan eksternal (Suandewi, 2021).

Whistleblowing system merupakan wadah dimana *whistleblower* dapat melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dijalankan oleh bagian dalam organisasi. Prosedur ini memiliki tujuan untuk menunjukkan tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian organisasi dan menghindari lebih banyak kecurangan (Wakhidah dan Mutmainah, 2021). Penerapan *whistleblowing system* adalah sarana yang digunakan untuk menanggulangi terjadinya penggelapan dana atau kecurangan yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana (Widyawati *et al.*,

2019). Meskipun sistem *whistleblowing* dianggap sebagai pengendalian penting untuk mendeteksi pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, dalam praktiknya perhatian terhadap perlindungan *whistleblower* masih relatif kurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaporan dugaan pelanggaran di dalam program pemberdayaan masyarakat, organisasi harus menetapkan kebijakan pengungkapan pelanggaran yang secara khusus mengatur perlindungan identitas pelapor pelanggaran, dan kemudian memasang iklan di ruang istirahat staf dengan nomor hotline yang memungkinkan masyarakat penerima program bantuan dapat melaporkan secara rahasia perilaku penipuan yang mencurigakan di dalam pelaksanaan program. (Maulidi and Ansell, 2020).

Penerapan *whistleblowing System* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan (Wakhidah dan Mutmainah, 2021). Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008) , menyatakan bahwa *whistleblowing system* terdiri dari tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek struktural
- b. Aspek operasional
- c. Aspek perawatan

Ketiga aspek tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *whistleblowing*.

2.5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi ditunjukkan dalam bentuk sikap penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah organisasi. Adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi (Meutia, 2021). Komitmen organisasi adalah sebuah kesetiaan atau loyalitas pegawai kepada organisasi tempatnya bekerja. Dengan adanya rasa komitmen terhadap organisasi tempatnya bekerja maka seseorang akan melakukan tindakan yang lebih baik dan menghindari tindakan kecurangan yang bisa merugikan banyak pihak. Komitmen organisasi dipandang sebagai suatu organisasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. (Putri *et al.*, 2023)

Komitmen organisasi yang dimiliki karyawan dibentuk oleh lingkungan kerja dan melalui proses pengembangan diri yang dilakukan oleh karyawan. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan yang dirasakan individu untuk terikat dalam organisasi dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi sehingga mereka memberikan usaha yang baik dalam mencapai tujuan organisasi dan tidak mudah untuk mencari pekerjaan diluar organisasi tempat mereka bekerja (Meutia, 2021).

Meyer and Allen (1984) mengemukakan tiga komponen mengenai komitmen organisasi:

1. *Affective Commitment* (komitmen afektif), terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment) atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi.
2. *Continuance Commitment* (komitmen berkelanjutan), yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena rewards ekonomi tertentu.
3. *Normative Commitment* (komitmen normative), timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

2.6. Sistem Pengendalian Internal

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) (dalam YPIA, 2016) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan keseluruhan dari harapan perusahaan serta strategi yang digunakan dengan tujuan utamanya untuk mengamankan seluruh harta perusahaan, memeriksa keakuratan serta efektivitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal dalam konteks *Integrated Risk Management* (IRM) adalah proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai, terutama terkait dengan efektivitas dan efisiensi

operasional, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai suatu proses yang memfokuskan pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau instansi secara terus menerus dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui ketaatan pada ketentuan yang berlaku, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan yang efektif dan efisien (Lestari *et al.*, 2019).

Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang terdapat didalam perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif adalah komponen penting dalam manajemen organisasi karena hal tersebut dapat membantu menjaga aset yang dimiliki oleh organisasi, keuangan dana manajerial dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku didalam organisasi serta dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, pelanggaran dan penyimpangan aspek kehati-hatian. Pengendalian internal adalah faktor penting dalam pencegahan kecurangan. Pengendalian internal adalah bagian dari sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Perusahaan pada umumnya akan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan sistem. Tujuan utama dari pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa persediaan dalam keadaan aman dan disajikan dalam laporan keuangan dengan akurat dan benar (Putri *et al.*, 2023).

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Meutia, 2021). Sedangkan Rizky dan Aida Fitri (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi manajemen dalam memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan merancang sistem yang dilengkapi dengan *internal control* yang cukup memadai sehingga kecurangan tidak mudah dilakukan oleh berbagai pihak dalam organisasi. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan asset pada lokasi yang tidak tepat.

Pengendalian internal dapat diartikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh struktur, pekerjaan, dan kinerja organisasi aliran otoritas, orang, dan sistem informasi manajemen yang dirancang untuk membantu tujuan organisasi agar sesuai dengan sasaran (Joseph *et al.*, 2015). Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan lain dari suatu perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmawati and Pradata, 2023).

Terdapat lima komponen kerangka dan merupakan indikator pengendalian internal menurut Tunggal (2010) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian Internal (*Control Environment*).

Lingkungan pengendalian terdiri dari kebijakan, tindakan dan prosedur yang menggambarkan sikap komponen puncak entitas baik manajemen, direksi dan pemilik entitas tersebut sehubungan dengan pentingnya pengendalian internal dalam entitas.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*).

Penilaian risiko merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU);

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).

Aktivitas pengendalian berguna untuk membantu meyakinkan manajemen bahwa tindakan pencegahantelah diambil untuk mengatasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi;

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*).

Pembentukan sistem informasi dan komunikasi akuntansi oleh suatu entitas bertujuan untuk memulai pencatatan, pengolahan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasionalnya dan untuk menjaga akuntabilitas aset terkait;

5. Pemantauan (*Monitoring*).

Pemantauan dilakukan untuk menilai kegiatan yang sedang berjalan dan dilakukan secara berkala sehubungan dengan sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh manajemen, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum.

2.7. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Oguda Ndege Joseph, Odhiambo Albert, Prof John Byaruhanga. (2015)	<i>Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> atau kecurangan
Taufeni Taufik (2019)	<i>The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan <i>good governance</i> terhadap pencegahan kecurangan.
Ni Kadek Ayu Suandewi (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan <i>Whistleblowing</i> Terhadap Pencegahan <i>fraud</i> Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan, dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Payangan)	penipuan pencegahan.
Mustafa Santiadji, Kartini, Darwis, Syamsuddin (2021)	<i>The Effect Of Internal Control And Individual Morality On Fraud Prevention In Pt. Regional Development Bank Of Southeast Sulawesi</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Pencegahan <i>fraud</i> , moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan secara simultan variabel bebas yaitu pengendalian internal dan moralitas individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan penipuan.
Tuti Meutia (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif Dan signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Timur.
Sri Widodo, Novia Putri Cahyaningrum (2023)	Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> , dan moralitas aparaturnya berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Errika Al Mufidah Priandini, Sarwenda Biduri (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang memberikan pengaruh bagi pencegahan fraud yaitu kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia), serta <i>Whistleblowing System</i> , kemudian moralitas individu. Sementara itu, faktor dari sistem pengendalian internal sebagai faktor yang tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

Sumber: *Diolah oleh penulis, 2024*

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan

Kecurangan dapat dicegah dengan *whistleblowing system* karena *whistleblowing system* merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan karyawan dan orang lain terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dilingkungan organisasi tempat mereka bekerja (Larasati *et al.*, 2017).

Sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut dengan *whistleblowing system* adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengungkapkan kecurangan yang bisa merugikan organisasi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan. *Whistleblowing* disini merupakan

pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Selain upaya audit yang bersifat *preventif*, upaya pengungkapan terhadap pelaku kecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir adanya kecurangan. Namun Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (Widyawati *et al.*, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widyawati *et al.*, (2019), Larasati *et al.*, (2017), Wakhidah dan Mutmainah (2021), Harahap *et al.*, (2022), Ulantari dan Suartana (2023), dan Suandewi (2021) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Whistleblowing ini merupakan suatu kebijakan yang sangat penting untuk ada pada sebuah organisasi sektor publik terutama pada setiap program pemerintah yang sedang dijalankan. Hal ini dikarenakan dapat membantu dalam proses pencegahan kecurangan melalui laporan yang dilakukan oleh *whistleblower*. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.8.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan kecurangan

Komitmen organisasi kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam menjelaskan keterlibatan diri kedalam bagian organisasi. Hubungan antara komitmen organisasi dengan pencegahan kecurangan sangat berkaitan. Dengan adanya komitmen organisasi dalam sebuah instansi pemerintahan dipercaya dapat

bermanfaat dalam hal membantu sebuah instansi yang menjalankan program dalam mencegah terjadi kecurangan. Pada dasarnya, komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pegawai yang memiliki komitmen dalam bekerja, maka mereka akan memandang usaha dan kinerja yang mereka berikan terhadap organisasi memiliki makna yang positif bagi kesejahteraan individu mereka sendiri. Sehingga apabila komitmen organisasi terhadap suatu instansi akan mendorong untuk mengetahui visi, misi, serta tujuan instansi dalam menjalankan program tersebut dan memperkecil tindakan penyimpangan yang terjadi di instansi tersebut (Ismuadi dan Saputra, 2016).

Komitmen organisasi yaitu sifat loyalitas yang ada dalam individu didalam suatu instansi atau organisasi hal tersebut merupakan bentuk kepemilikan terhadap organisasi tempatnya bekerja (Reskia dan Sofie, 2022). Dengan adanya kesetiaan dan rasa memiliki kemungkinan berkurangnya kecurangan yang terjadi. Adanya komitmen yang dimiliki oleh setiap pegawai yang berhubungan langsung dengan setiap program pemerintah yang sedang dijalankan akan mengurangi keinginan setiap individu untuk melakukan kecurangan seperti penyelewengan dana. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ismuadi dan Saputra (2016), Reskia dan Sofie (2022), Meutia (2021) menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Oleh sebab itu hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.8.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik dan tepat dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu evaluasi. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Widyawati *et al.*, 2019). Penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi, sehingga sistem pengendalian internal menjadi sangat penting dalam suatu organisasi untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut (Widyawati *et al.*, 2019).

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas, dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Leatemia dan Febryanti, 2020). Pengendalian internal yang efektif memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, sehingga dapat menutup peluang terjadinya perilaku menyimpang. sistem pengendalian internal yang efektif merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara, dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya pengendalian

internal yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan (Leatemia dan Febryanti, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widyawati *et al.* (2019), Larasati *et al.*, (2017), Leatemia dan Febryanti (2020), Rizky dan Aida Fitri (2017), Widyastuti dan Sari (2023), Suandewi (2021) yang menyatakan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

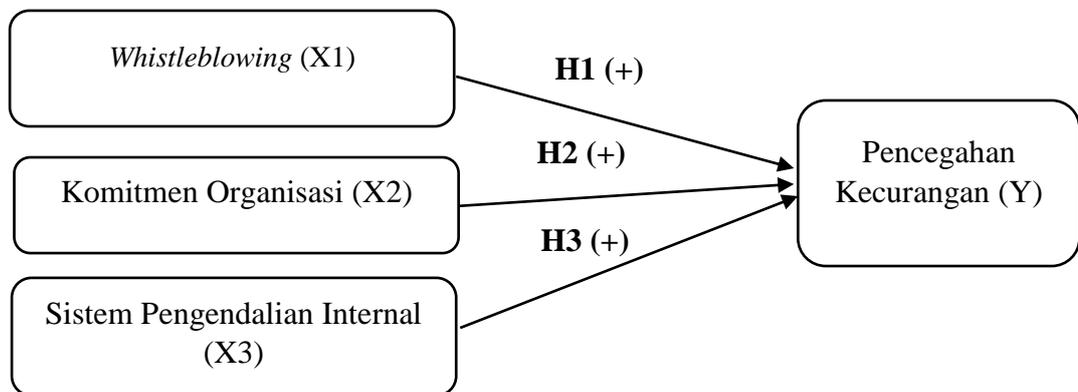
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.9. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



Sumber: *Diolah oleh peneliti, 2024*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari pertanyaan yang ditentukan melalui kuesioner (angket) yang akan disebar pada kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di seluruh provinsi Indonesia. Penelitian ini menggunakan skala likert dengan interval 5 point dan diberi bobot 1 sampai dengan 5 yaitu:

- 1) Sangat tidak setuju
- 2) Tidak Setuju
- 3) Kurang Setuju
- 4) Setuju
- 5) Sangat Setuju

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *whistleblowing*, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan.

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<p>Pencegahan Kecurangan (Y)</p> <p>Sumber: Arens <i>et al.</i>, (2015)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan budaya jujur 2. Manajemen yang bertanggungjawab 3. Kontrol dari komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi 2. Evaluasi 3. Pengawasan 	Interval
<p><i>Whistleblowing</i> (X1)</p> <p>Sumber : Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008) dan Fitriani dkk. (2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Struktural 2. Aspek Operasional 3. Aspek Perawatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalitas 2. Penyelidikan 3. Pengaduan 	Interval
<p>Komitmen organisasi (X2)</p> <p>Sumber: Meyer and Allen (1984), Prasetio (2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Afektif 2. Komitmen Berkelanjutan 3. Komitmen Normatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas 2. Loyalitas 3. Dedikasi 	Interval
<p>Sistem Pengendalian Internal (X3)</p> <p>Sumber: Tunggal (2010) Wiliana dkk. (2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penafsiran risiko 3. Prosedur pengendalian 4. pemantauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Oprasional 2. Risiko yang mungkin terjadi 3. Transaksi dan aktivitas 4. Laporan 	Interval

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Langkah penelitian salah satunya adalah menentukan obyek yang akan diteliti dan besarnya populasi yang ada di objek penelitian. Menurut Sugiyono (2016) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya Sampel merupakan bagian dari

karakteristik dan jumlah yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Populasi yaitu ± 396 Orang yang terdiri dari Fasilitator pendamping masyarakat, aparat desa, dan kelompok masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kementrian PUPR, karena mereka terlibat secara langsung dalam menjalankan program pemberdayaan dari pemerintah. Fasilitator pendamping masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat Kementrian PUPR merupakan individu atau kelompok yang berperan sebagai mediator dan pendamping dalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat. Mereka bertugas untuk memfasilitasi interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya, serta membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas, menggali potensi local dan mencapai kemandirian.

Peran fasilitator pendamping masyarakat yaitu sebagai Edukator yang memberikan pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat tentang program pemberdayaan, sebagai motivator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, sebagai mediator yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak lain, sebagai advokat yang membantu masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan, sebagai dinamisator yang Mendorong perubahan sosial pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir sebagai teknokrat yang memberikan saran teknis terkait bidang pemberdayaan seperti ekonomi, sosial atau lingkungan.

Tugas pokok dan fungsi fasilitator pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya. Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi dari fasilitator pemberdayaan masyarakat :

1. Perencanaan dengan melakukan pemetaan social dan ekonomi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, potensi dan permasalahan masyarakat dan menyusun rencana kerja pemberdayaan bersama masyarakat dan pihak terkait.
2. Pelaksanaan dengan memfasilitasi diskusi dan musyawarah dalam perencanaan program pemberdayaan, memberikan pelatihan, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
3. Penguatan kapasitas masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan ketrampilan masyarakat agar mandiri, mengembangkan kelompok kelompok masyarakat, memotivasi masyarakat untuk mengelola sumber daya local secara berkelanjutan.
4. Monitoring dan evaluasi dengan mengawasi jalanya program pemberdayaan masyarakat dan melakukan pendampingan secara berkala, mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama masyarakat, melakukan evaluasi dampak program dan menyusun laporan perkembangan.

Selain fasilitator pemberdayaan masyarakat, aparat desa dan kelompok masyarakat menjadi populasi dalam penelitian ini, aparat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena mereka adalah pemimpin dan penggerak utama ditingkat local, lalu kelompok masyarakat karena mereka adalah subjek utama yang menjalankan dan merasakan manfaat dari program tersebut, peran utama aparat desa dan kelompok masyarakat adalah :

1. Partisipasi aktif dalam Perencanaan Pembangunan dengan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di lingkungan mereka, berpartisipasi dalam penyusunan rencana program pemberdayaan bersama pemerintah dan

fasilitator, menyampaikan aspirasi, ide dan usulan yang sesuai dengan kondisi lokal.

2. Pelaksana Program Pemberdayaan dengan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah disepakati, mengelola sumber daya yang diberikan (bantuan dana, peralatan, pelatihan).
3. Penggerak di masyarakat dengan mendorong keterlibatan lebih banyak anggota masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, menyebarkan informasi dan manfaat dari program kepada masyarakat luas.
4. Pengawas dan Evaluator Program dengan memastikan program berjalan sesuai rencana dan prinsip pemberdayaan, melaporkan kendala atau penyimpangan kepada aparat desa atau fasilitator, memberikan masukan untuk perbaikan dan keberlanjutan program di masa mendatang.
5. Penjaga keberlanjutan Program dengan mengelola hasil program agar tetap berjalan meskipun tugas pendamping berakhir, membangun system atau kelompok kerja agar program tetap berfungsi.

3.3.2 Sampel Penelitian

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Menurut Sugiyono (2016), *non probability sampling* adalah teknik penarikan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling sesuai dengan kriteria sebagai sumber data. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2016)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: kelonggaran

Ketidakteelitian atau derajat toleransi Jumlah populasi ini merupakan ukuran populasi (N) dalam rumus slovin. Derajat toleransi yang ditentukan sebesar 0,1% didapat berdasarkan akurasi sebesar 90% dikurangi dengan 100%, sehingga memberikan hasil jumlah sampel penelitian minimal 99,9 atau sama dengan 100.

Berikut adalah perhitungan sampel dengan rumus Slovin :

$$N = \frac{396}{1+396 (0,1^2)} = 99,9$$

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan pada analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Structural Equation Model-Partial Least Square* (SEM-PLS). Menurut Noor (2014), SEM merupakan teknik statistika yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat, metode SEM merupakan perkembangan dari analisis jalur path analysis dan regresi berganda *multiple regression* yang sama-sama merupakan bentuk model analisis *multivariate multivariate analysis* yang dapat menganalisis data secara lebih komprehensif.

Jenis SEM dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu SEM berbasis *covariance* atau *Covariance Based Structural Equation Modeling* (CBSEM) dan SEM berbasis varian atau komponen / *Variance or Component Based SEM* (VB-SEM) yang meliputi *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* (PLS) bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritis di antara kedua variabel. Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM menggunakan aplikasi Smart-PLS yang berbasis *covarian* adalah tujuan penggunaannya. Disamping itu, besar pada penggunaan PLS-SEM dapat digunakan untuk ukuran sampel kecil, tidak mendasar pada berbagai asumsi, serta dapat digunakan pada data yang mengalami permasalahan seperti data tidak berdistribusi normal, masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi.

Proses iterasi yang dilakukan pada model PLS terdiri atas tiga tahap. Iterasi pertama menghasilkan *weight estimate* yang dilakukan dalam iterasi algoritma, yang digunakan sebagai parameter validitas dan reliabilitas instrumen. Iterasi kedua menghasilkan nilai *inner* dan *outer* model. *Inner* model digunakan sebagai parameter signifikansi dalam pengujian hipotesis sedangkan *outer* model digunakan sebagai parameter validitas konstruk (reflektif dan formatif). Iterasi ketiga menghasilkan skor *mean* dan konstanta variabel laten yang digunakan sebagai parameter, sifat hubungan kausalitas dan rerata nilai sampel yang dihasilkan. Iterasi merupakan teknik estimasi secara bertahap untuk menghasilkan nilai terbaik.

3.5 Pengukuran Variabel dan Uji Hipotesis

3.5.1 Pengukuran Variabel

3.5.1.1 Analisis Data Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Menurut (Cooper, 2014) Mempersiapkan ringkasan statistik deskriptif adalah langkah awal lain yang mengarah pada pemahaman tentang data yang dikumpulkan. Hasil analisis deskriptif dilakukan untuk mengukur butir-butir masing-masing konstruk dengan skewness dan kurtosis. Hasil nilai *skewness* semua item antara 1 dan 1, dan nilai kurtosis antara 2 dan 2 menunjukkan distribusi data mendekati distribusi normal (Hair, 2017) dan tidak ada masalah normalitas. Meskipun PLS-SEM adalah pendekatan non-parametrik dan dapat menangani data non-normal, literatur terbaru merekomendasikan untuk menghindari data terdistribusi sangat tidak normal (Ali *et al.*, 2018; Hair Jr *et al.*, 2021).

3.5.1.2 Analisis SEM-PLS

Menurut (Hair *et al.*, 2019) Pemodelan persamaan struktural (SEM) adalah teknik yang memungkinkan hubungan terpisah untuk masing-masing dari satu set variabel dependen. Dalam pengertian yang paling sederhana, pemodelan persamaan struktural menyediakan teknik estimasi yang tepat dan paling efisien untuk serangkaian persamaan regresi berganda terpisah yang diestimasi secara bersamaan. Hal ini ditandai oleh dua komponen dasar: (1) model struktural dan (2) model pengukuran. Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model* (Ghozali, 2014).

Model pengukuran (*measurement model*) atau *outer model* menunjukkan bagaimana variabel *manifest* atau *observed* variabel merepresentasi variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural (*structural model*) atau *inner model* menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Hair *et al.*, 2019) bahwasannya model struktural adalah model jalur, yang menghubungkan independen dengan variabel dependen, dan model pengukuran memungkinkan peneliti untuk menggunakan beberapa variabel (indikator) untuk variabel independen atau dependen tunggal.

Variabel laten yang dibentuk dalam PLS-SEM, indikatornya dapat terbentuk reflektif maupun formatif. Indikator reflektif atau model A merupakan indikator yang bersifat manifestasi terhadap konstruk dan sesuai dengan *classical test theory* yang mengasumsikan bahwa *variance* didalam pengukuran score variabel laten merupakan fungsi dari *true score* ditambah dengan error. Sedangkan indikator formatif atau sering disebut model B merupakan indikator yang bersifat mendefinisikan karakteristik atau menjelaskan konstruk (Ghozali, 2014).

3.5.1.3 Analisa Outer Model (Model Pengukuran)

Pengukuran model melalui analisis faktor konfirmatori adalah dengan menggunakan pendekatan MTMM (*MutiTrait-MultiMethod*) dengan menguji validitas *convergent* dan *discriminant*. Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi.

Uji validitas *convergent* indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *loading factor* yang muncul dimana harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian *confirmatory* dan nilai *loading factor* dengan jenjang 0,6-0,7 untuk penelitian dengan sifat *exploratory* atau penjelasan dan juga syarat lainnya adalah nilai dari *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5 namun apabila untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran masih dianggap cukup dengan nilai 0,5-0,6 untuk nilai *loading factornya*.

Uji validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi cara untuk menguji validitas *discriminant* dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus >0.70 . cara lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas *discriminant* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model.

Uji reabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan cara *Cronbach's Alpha* untuk menguji reabilitas konstruk yang akan memberikan nilai yang lebih rendah (*under estimate*), dan menurut (Malhotra, 2010) Koefisien alfa, atau alfa Cronbach, adalah rata-rata dari semua kemungkinan koefisien split-half yang dihasilkan dari cara yang berbeda untuk membagi item skala. Koefisien ini bervariasi dari 0 hingga 1, dan nilai 0,6 atau kurang umumnya menunjukkan keandalan konsistensi internal yang tidak memuaskan. Ringkasan *rule of thumb* evaluasi model pengukuran (Mode A) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Ringkasan Rule Of Thumb Evaluasi Model Pengukuran

Validitas dan Reabilitas	Parameter	Rule of Thumb
Validitas Convergent	<i>Loading Factor</i>	> 0.70; 0,5 Confirmatory Research
	Average Variance Extracted (AVE)	>0.50 untuk Confirmatory Research
Validitas Discriminant	<i>Cross Loading</i>	>0.70 untuk setiap variable
	Akar kuadrat AVE dan korelasi antar Konstruk Laten Heterotrait-monotrait Ratio (HTMT)	Akar Kuadrat AVE > Korelasi antar Konstruk Laten HTMT < 0.90
Reliabilitas	<i>Cronbach's Alpha</i>	>0.70 untuk Confirmatory Research

Sumber: (Ghozali, 2014; Hair et al., 2019)

3.5.1.4 Analisa Inner Model (Model Struktural)

Dalam menilai model *structural* dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model *structural*. Perubahan nilai *R-Squares* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substansif. Nilai *R-Squares* 0.75, 0.50 dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS *R-Squares* mempresentasi jumlah *variance* dari konstruk dijelaskan oleh model. Nilai f^2 0.02, 0.15 dan 0,35 sama dengan yang direkomendasikan (Cohen, 1988) untuk definisi operasional regresi berganda. Nilai tersebut dapat di interpretasikan bahwa predictor variabel laten memiliki pengaruh kecil menengah dan besar pada level *structural*. Disamping melihat besarnya nilai *R-Squares*, evaluasi model - PLS juga dilakukan dengan Q^2 *predictive relevance* atau sering disebut *predictive sample reuse*.

Teknik ini dapat merepresentasikan *synthesis* dari *cross-validation* dan fungsi fitting dengan prediksi dari *observed* variabel dan estimasi dari parameter konstruk. Pendekatan ini diadaptasi PLS dengan menggunakan *blindfolding*. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Dalam kaitannya dengan f^2 perubahan Q^2 memberikan dampak relative terhadap model struktural. Nilai q^2 *predictive relevance* 0.02, 0.15 dan 0.35 menunjukkan bahwa model lemah, moderate kuat. Evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur *bootstrapping*. Pendekatan *bootstrap* mempresentasi non parametrik untuk precision dari estimasi PLS. jumlah bootstrap yang diperlukan sebesar 200-1000 dan itu sudah dianggap cukup untuk melakukan koreksi standard error.

Tabel 3.3. Ringkasan Rule Of Thumb Evaluasi Model Struktural

Kriteria	Rule of Thumb
<i>R-Square</i>	0.67, 0.33 dan 0.19 menunjukkan model kuat moderate lemah 0.75, 0.50 dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah.
Q^2 <i>predictive relevance</i>	$Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai <i>predictive relevance</i> , sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki <i>predictive relevance</i> .

Sumber: (Ghozali, 2014; Hair et al., 2019)

3.5.1.5 Uji Model Struktural

Hipotesis merupakan penjelasan sementara yang dimunculkan oleh peneliti yang harus dibuktikan oleh fakta di lapangan. Hipotesis umumnya terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif adalah hipotesis

yang ditawarkan oleh peneliti sedangkan hipotesis nol adalah hipotesis yang diuji. Sesuai oleh yang dinyatakan oleh (Malhotra, 2010) bahwasannya hipotesis nol adalah pernyataan di mana tidak ada perbedaan atau efek yang diharapkan. Jika hipotesis nol tidak ditolak, tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Hipotesis alternatif adalah pernyataan bahwa beberapa perbedaan atau efek diharapkan. Menerima hipotesis alternatif akan menyebabkan perubahan pendapat atau tindakan.

Ukuran signifikansi dalam hipotesis dapat menggunakan perbandingan nilai dari t-tabel dan t-statistik. Apabila nilai t-statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai yang ada pada t-tabel berarti bahwa hipotesis didukung. Nilai koefisien jalur atau uji-t digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi pengujian model hipotesis. Nilai t-statistic harus diatas T-tabel yaitu diatas 1,96 untuk *one-tailed* pada signifikansi (α) 5%. Dapat disimpulkan bahwa cara menentukan apakah hipotesis didukung atau tidak yaitu dengan taraf signifikansi 5% menggunakan hipotesis *one-tailed* yaitu: Apabila t-statistik $\geq 1,96$ maka H0 tidak didukung dan H1 didukung, Apabila t-statistik $< 1,96$ maka H0 didukung dan H1 tidak didukung Pengujian mediasi digunakan untuk melihat dimana satu variable mempengaruhi yang lain. Hasil ini, yang tersedia dalam laporan hasil SmartPLS, memungkinkan dilakukannya analisis mediator dan hasil SmartPLS memungkinkan analisis model mediasi tunggal dan ganda (Hair, 2017).

3.5.1.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0

$<R^2 < 1$. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati angka 1, maka model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya. Untuk mengevaluasi model regresi terbaik, Penelitian ini berpatokan pada nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi yang sudah disesuaikan karena apabila memakai nilai *R Square* akan menimbulkan suatu bias yang dapat meningkatkan R^2 jika ada penambahan variabel independen. Berbeda dengan *R Square*, nilai *Adjusted R Square* tidak akan menimbulkan bias karena nilai *R Square* dapat naik atau turun apabila sebuah variabel independen ditambahkan dalam model.

3.6 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab-akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel.

Menurut Sarwono (2007) dibawah ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang sebaiknya dipenuhi dalam analisis jalur diantaranya ialah:

1. Adanya linieritas (*linierity*). Hubungan antar variabel bersifat linier.
2. Adanya aditivitas (*additivity*). Tidak ada efek-efek interaksi.
3. Data berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval (*scaled value*). Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan metode suksesive interval (MSI) terlebih dahulu.

4. Semua variabel residual (yang tidak diukur) tidak berkorelasi dengan salah satu variabel dalam model.
5. Istilah gangguan (*disturbance terms*) atau variabel residual tidak boleh berkorelasi dengan semua variabel *endogenous* dalam model. Jika dilanggar maka akan berakibat hasil regresi menjadi tidak tepat untuk mengestimasi parameter- parameter jalur.
6. Sebaiknya hanya terdapat multikolonieritas yang rendah. Maksud multikolonieritas adalah dua atau lebih variabel bebas (penyebab) mempunyai hubungan yang sangat tinggi. Jika terjadi hubungan yang tinggi maka akan mendapatkan standar *error* yang besar dari koefisien beta (b) yang digunakan untuk menghilangkan varian biasa dalam melakukan analisis korelasi secara parsial.
7. Adanya rekursivitas. Semua anak panah mempunyai satu arah, tidak boleh terjadi pemutaran kembali (*looping*).
8. Spesifikasi model sangat diperlukan untuk menginterpretasi koefisien-koefisien jalur. Kesalahan spesifikasi terjadi ketika variabel penyebab yang signifikan dikeluarkan dari model. Semua koefisien jalur akan merefleksikan kovarian bersama dengan semua variabel yang tidak diukur dan tidak akan dapat diinterpretasi secara tepat dalam kaitannya dengan akibat langsung dan tidak langsung.
9. Terdapat masukan korelasi yang sesuai. Artinya, jika menggunakan matriks korelasi sebagai masukan, maka korelasi *Pearson* digunakan untuk dua variabel berskala interval; korelasi *polychoric* untuk dua variabel berskala ordinal; *tetrachoric* untuk dua variabel dikotomi (berskala nominal); *polyserial*

untuk satu variabel interval dan lainnya ordinal; dan *biserial* untuk satu variabel berskala interval dan lainnya nominal.

10. Terdapat ukuran sampel yang memadai. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, sebaiknya digunakan sampel di atas 100.
11. Sampel sama dibutuhkan untuk penghitungan regresi dalam model jalur.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. *Whistleblowing* memberikan kontribusi signifikan dengan mendorong pelaporan pelanggaran secara dini, yang efektif dalam mencegah dan mengurangi risiko kecurangan. Sistem whistleblowing yang aman dan mudah diakses dapat meningkatkan keberanian individu untuk melaporkan indikasi kecurangan.
2. Komitmen organisasi menjadi elemen kunci dalam membangun budaya etika yang kuat di lingkungan kerja. Komitmen dari seluruh anggota organisasi, terutama dari pemimpin, mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai integritas dan menekan peluang terjadinya kecurangan.
3. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai lapisan pengamanan utama terhadap risiko kecurangan dengan memberikan kerangka kerja yang memastikan kepatuhan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses organisasi.
4. Penelitian ini menegaskan bahwa *whistleblowing*, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Ketiga faktor ini berperan penting dalam membangun tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terletak pada sampel penelitian. Sampel yang diperoleh hanya sebesar batas minimal yang harus diteliti yaitu 100 responden. Sehingga penelitian ini tidak menggambarkan keseleruhan populasi yang seharusnya diteliti.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan ulasan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pencegahan kecurangan dalam organisasi:

1. Penguatan Sistem *Whistleblowing*

1. Organisasi perlu menyediakan sistem *whistleblowing* yang mudah diakses, aman, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
2. Memberikan pelatihan kepada fasilitator pendamping masyarakat, aparat desa dan kelompok masyarakat tentang pentingnya *whistleblowing* serta menjamin perlindungan terhadap pelapor dari potensi tindakan balasan.
3. Mengintegrasikan teknologi, seperti platform pelaporan online, untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan respons terhadap dugaan kecurangan.

2. Meningkatkan Komitmen Organisasi

1. Pemimpin organisasi harus menjadi teladan dalam menunjukkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika.
2. Menanamkan budaya kerja yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran melalui pelatihan rutin dan komunikasi internal.

3. Memberikan insentif kepada fasilitator pendamping masyarakat yang menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan anti-kecurangan dan kontribusi positif terhadap program pemberdayaan.

3. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Memperkuat aktivitas pengendalian, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan audit rutin, untuk meminimalkan celah kecurangan.
3. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko kecurangan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

4. Kolaborasi dan Edukasi Berkelanjutan

1. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemimpin, dan auditor eksternal, dalam mendukung pencegahan kecurangan.
2. Menyediakan pelatihan rutin tentang tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko kecurangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di semua level organisasi.

5. Penegakan Sanksi yang Tegas

1. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada pelaku kecurangan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*).
2. Memastikan bahwa sanksi diterapkan tanpa diskriminasi untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem tata kelola organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arens, Randal, E., & Beasley, M. S. (2015). Auditing and Assurance Services : An integrated Approach. In *Fifeteen Editions*. Erlangga.
- Ampl.or.id. (2016). *Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Pokja AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan*. 1–2. <https://www.ampl.or.id/program/program-nasional-penyediaan-air-minum-dan-sanitasi-berbasis-masyarakat-pamsimas-/2>
- Arifin, J. (2020). *Fraud-Mendeteksi-dan-Mengatasinya-Pendekatan-Akuntansi-Forensi_compressed.pdf*.
- Dituntut 3,5 Tahun, Ini Pembelaan PH Terdakwa Dugaan Korupsi Program Kotaku, kedai-berita.com 2022 (2022). <https://www.azhan.co/biodata-syafiqah-aina-instafamous-dan-pemilik-kosmetik-nsa-beau/>
- Elias, R. (2008). Auditing students' professional commitment and anticipatory socialization and their relationship to whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, 23(3), 283–294. <https://doi.org/10.1108/02686900810857721>
- Fitriani, S. D., Dewata, E., & Indriasari, D. (2022). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan Kesadaran Anti-Fraud. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 140–151. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738>
- Governance, K. N. K. G. C. (KNKG). (2018). *Pedoman Whistleblowing System*.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis*.
- Harahap, D. S. P., Nasrizal, N., Indrawati, N., & Sandri, S. H. (2022). The Pengaruh Internal Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 82–91. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3065>
- Indonesia, M. K. R. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012* (Vol. 4, Issue 1).
- Ismuadi, & Saputra, M. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm Mpd) Di Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 75–82.
- Kejari Tingkatkan Pengusutan Korupsi PNPM Ke Penyidikan (2024).
- Kominfo. (2024). *Indonesia Perkenalkan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di World Water Forum ke-10*. 5–10. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/56377/indonesia-perkenalkan->

program-penyediaan-air-minum-berbasis-masyarakat-di-world-water-forum-ke-10/0/artikel_gpr

Korupsi Berjamaah , Dana PNPM Kecamatan (2019).

Korupsi Proyek Pamsimas Di Muaro Jambi, Kejari Tahan Jangcik, Detik Sumbagsel 1 (2023). <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6964399/korupsi-proyek-pamsimas-di-muaro-jambi-kejari-tahan-jangcik>

Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3 No.2, 43–60.

Leatemia, S. Y., & Febryanti, N. F. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon). *Arika*, 14(1), 15–22. <https://doi.org/10.30598/arika.2020.14.1.15>

Lestari, W., Azwardi, A., & Siddik, S. (2019). Can Internal Control Prevent Fraud in Managing Village Funds? *Accounting and Finance*, 4(4(86)), 112–118. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-4\(86\)-112-118](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-4(86)-112-118)

Maulidi, A., & Ansell, J. (2020). Tackling practical issues in fraud control: a practice-based study. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 493–512. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0150>

Meutia, T. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(2), 79–90.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the “side-bet theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. *Journal of Applied Psychology*, 69(3), 372–378. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.69.3.372>

Mustopa, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 244–250.

Ndege Joseph, O., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention ISSN*, 4(1), 47–57. www.ijbmi.org

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistleblowing. *Citation Classics from The Journal of Business Ethics: Celebrating the First Thirty Years of Publication*, 153–172. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_8

Periansya, P., Dewata, E., Sopiyan, A. R., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 556–566. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51)

- Prasetio, P. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information (JRI) dan Komitmen. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(1), 151–169.
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/103>
- Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.6>
- PUPR. (2017). *Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*. Kotaku.PU.
<https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>
- Putri, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi. *Jurnal Economina*, 2(7), 1789–1802.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.674>
- Rahmawati, L., & Pradata, B. G. (2023). The Influence Of Corporate Culture And Internal Control Systems On The Prevention Of Merchandise Fraud. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1483–1494.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2357>
- Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Rastegar, R., & Hall, C. M. (2021). Destination image during the COVID-19 pandemic and future travel behavior: The moderating role of past experience. *Journal of Destination Marketing & Management*, 21(February), 100620.
<https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100620>
- Reskia, R., & Sofie. (2022). Pengaruh Internal Audit, Anti Fraud Awareness, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi kasus PT. Inti Persada Nusantara). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 419–432. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14531>
- Rizky, M., & Aida Fitri, F. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 1.
- Santiadji, M., Kartini, Darwis, & Syamsuddin. (2021). The Effect Of Internal Control And Individual Morality On Fraud Prevention In Pt. Regional Development Bank Of Southeast Sulawesi. *RJOAS*, 1(January), 36–42.
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Journal of Financial Crime Fraud awareness survey of private sector in Indonesia Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime Managerial Auditing Journal Journal of Financial Crime Iss Journal of Financial Crime Journal of Financial Crime*, 222222(1), 329–346.
<http://dx.doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/JFC-07-2013-0045>

- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 29–49. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1799>
- T, D. A. W., & Tunggal, I. S. (2012). *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*.
- Taufik, T. (2019). The effect of internal control system implementation in realizing good governance and its impact on fraud prevention. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 2159–2165.
- Tunggal, A. W. (2010). *Teori dan Praktek Auditing*. Harvarindo.
- Ulantari, P. P., & Suartana, I. W. (2023). Locus of Control, Whistleblowing, Kesesuaian Kompensasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1743–1754. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i07.p04>
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect , Whistleblowing System , Internal Locus of Control Dan Kompetensi Aparatur. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39.
- Widyastuti, E., & Sari, D. N. (2023). Determinan Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kab. Semarang). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 34. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.15390>
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.
- Wiliana, R., Rachmadani, F., Syamsuddin, S., Nagu, N., & Farid, A. F. (2023). Internal Control System On Fraud Prevention Moderate By Bugis Cultural Values. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(2), 237–252. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1549>